

Implementasi Kebijakan Program Jak-Lingko Transjakarta dalam Upaya Perbaikan Transportasi Publik di Pinang Ranti Jakarta Timur

Widya Rhenata Sianturi¹; Azhari Aziz Samudra²; Uchaimid Biridlo¹I Robby³

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Krisnadwipayana

²Program Studi Administrasi Publik, Universitas Krisnadwipayana

³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Krisnadwipayana

Article Info	Abstract
Article History Received: 4 Agustus 2023 Accepted: 26 Juni 2023	<i>Jak-lingko is a program established by the DKI Jakarta Provincial Government through PT, Transjakarta as the executor of the Jak-lingko program. As regulated in Pergub Number 110 of 2003 and Pergub Number 96 of 2018 concerning the new transportation system. To identify policy implementation using success variables to achieve the objectives of policy implementation or program implementation (Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure) are indicators of policy implementation proposed by George Edward III. This study discusses the Implementation of Jak-Lingko Program Policies in Efforts to Improve Public Transportation in Pinang Ranti East Jakarta in 2018. The type of research used is qualitative research, data collection techniques, namely observation, interviews and documentation related to research.</i>
Keywords <i>Policy Implementation, Jak-lingko Program, Public Transportation</i>	<i>The results of this study explain that from the beginning the implementation of the jak-lingko environment program has been quite effective but it is indeed necessary to realize or deliver more about the jak-lingko environment program to the people of Jakarta.</i>
DOI:	

PENDAHULUAN

Masalah yang terjadi salah satunya masalah serius di Jakarta adalah kemacetan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Jakarta memegang posisi sangat penting dalam hal politik, ekonomi, dan perdagangan. Semakin banyak alat transportasi baik milik pribadi maupun umum yang memadati lalu lintas jalan raya di ibukota jakartayang sekarang ini menyebabkan kemacetan sehingga perjalanan kurang efisien dalam hal waktu.

Kondisi lalu lintas jalan raya yang semakin memburuk di Indonesia akibat bertambahnya jumlah kendaraan pribadi, karena menurut masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi akan mengurangi resiko kemacetan lalu lintas di jalan raya, lalu dari segi biaya pun masyarakat hanya mengeluarkan biaya yang lebih murah dibandingkan harus mengeluarkan ekstra ongkos untuk menggunakan kendaraan umum.

Faktor yang mengakibatkan masyarakat lebih kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum yaitu; pertama, kepemilikan suatu armada secara individual dan bukan secara operator yang memang diberi mandat untuk menjalankan bisnis angkutan kota; kedua, kualitas armada dibawah standar mungkin beberapa kasus sudah banyak ditemukan

angkutan kota yang sudah tua dibiarkan begitu saja digunakan di Jakarta; ketiga, kompetisi yang tidak sehat antar operator misalnya terjadi kebut-kebutan di jalanan dengan dua angkoot jalan bareng-bareng; empat; tarif angkutan umum yang tidak terintegrasi sehingga menyebabkan penumpang harus membayar tarif berkali-kali serta mahal; kelima; kondisi infrastruktur yang tidak memadai.

Persoalan transportasi Jakarta menjadi semakin rumit tatkala dimunculkan data terbaru yang dikeluarkan dinas perhubungan DKI yang menunjukkan pertambahan jumlah kendaraan pribadi di Jakarta menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 jumlah data kendaraan mengalami penurunan yang drastis, pada tahun 2016 jumlah kendaraan mengalami penambahan yang drastis rata – rata tumbuh 5% selama tahun, tahun 2017 jumlah kendaraan berjumlah 14 juta unit, tahun 2018 berjumlah 17 juta unit.

Menurut data akhir Desember 2018 tercatat 145.790 kartu jak-lingko yang sudah terjual, hingga Januari 2019 penjualan kartu jak-lingko telah mencapai 178.003. Bagi pengguna transportasi umum baru bisa mendapatkan kartu jak-lingko di halte Transjakarta seharga Rp.30.000 dengan saldo Rp. 10.000. Sementara pembelian di rute bus kecil, kartu dijual dengan harga Rp.20.000. Namun untuk sistem pembayarannya sendiri saldo jak-lingko Transjakarta telah melakukan kerja sama dengan pihak bank yang bersangkutan, yaitu kartu Tapcash (BNI) dan Jakcard (Bank DKI) di bus kecil. Pengguna jak-lingko juga terhubung dengan layanan Transjakarta di koridor maupun non-koridor.

Pemerintah juga telah menetapkan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2003 adalah mengoperasikan bus Transjakarta pada tanggal 15 Januari 2004, dan pada kesempatan tersebut digunakan untuk sosialisasi, dimana warga Jakarta untuk pertama kalinya mengenal sistem transportasi yang baru (Pergub, No.110 Tahun 2003).

Untuk mengetahui bagaimana mengevaluasi program Transjakarta dalam upaya perbaikan transportasi publik maka peneliti mengambil judul. “Implementasi kebijakan program jak-lingko Transjakarta dalam upaya perbaikan transportasi publik di Pinang Ranti Jakarta Timur”. Permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Deskripsi Implementasi Kebijakan Program Jak-lingko di Pinang Ranti Jakarta Timur”.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Mazmania dan Sebastiar yang dikutip oleh Wahab (2008:68) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sementara itu Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Wahab (2008:65) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat – pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan atau implementasi program. Pertama, Komunikasi adalah pelaksana kebijakan atau setiap pelaksana program yang dimana komunikasi merupakan

suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal-balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi tersebut ditentukan oleh tiga indikator penting, penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi, dan kejelasan komunikasi. Terdapat tiga indikator keberhasilan yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi tersebut; Transmisi Sebagai penyaluran komunikasi yang baik maksudnya tidak adanya salah pengertian atau miskomunikasi karena hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkat birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Kejelasan adalah diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Karena para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi yang valid atau jelas agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten program atau kebijakan. Konsistensi adalah bentuk perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten. Karena bila perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. Kedua, Ketersediaan sumberdaya adalah sumberdaya sebagai pendukung berjalanya implemetasi program atau kebijakan yaitu, Sumberdaya Manusia Sebagai aktor atau peran penting dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan dan sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang baik secara fisik maupun non-fisik. Informasi Sebagai sumberdaya kedua setelah sumberdaya manusia yang dimana mempunyai peran penting dalam impellentasi kebijakan. Informasi yang disampaikan juga harus jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksana program atau kebijakan. Kewenangan Berperan sebagai penengah dimana memiliki peran sebagai hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.

Ketiga, Sarana dan Prasarana berperan sebagai alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana prasarana juga disebut sebagai perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja dalam pelaksanaan jalannya program atau kebijakan. Pendanaan membiayai operasional implementasi program atau kebijakan tersebut, apakah informasi tersebut relevan atau tidak relevan, dan yang mencukupi bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, Sikap dan komitmen dalam pelaksana program. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan. Keempat, Struktural birokrasi adalah Menjelaskan bahwa susunan tugas dan para pelaksana program atau pelaksana kebijakan, memecahkan dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati oleh orang itu sendiri. Selanjutnya penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti dengan maksud

untuk memperoleh gambaran tentang fenomena sosial yang terjadi, untuk kemudian dianalisis berdasarkan pengamatan atau penemuan yang ada di lapangan.

Data kualitatif merujuk pada material kasar yang dikumpulkan peneliti dari dunia yang sedang mereka teliti; data adalah bagian-bagian khusus yang membentuk dasar-dasar analisis. Data meliputi apa yang dicatat orang secara aktif selama studi, seperti transkrip wawancara dan catatan lapangan observasi. Data juga termasuk apa yang diciptakan orang lain dan yang ditemukan peneliti, seperti catatan harian, fotografer, dokumen resmi, dan artikel surat kabar.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, terutama dalam menanggapi sebuah fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, dalam pengambilan sebuah lokasi harus mempertimbangkan banyak hal termasuk mempertimbangkan waktu, biaya, proses, dan tenaga yang dilakukan, untuk itu peneliti dengan sengaja membuat penelitian di Pinang Ranti Jakarta Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan penelitian di lapangan yang ditemukan saat melakukan penelitian di lokasi penelitian, antara lain:

Pada bagian pembahasan ini, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh George Edwards III mengenai implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Komunikasi Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan haruslah ditransmisikan kepada sasaran kelompok sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Pertama transmisi, dimana kebijakan publik hendaknya disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak – pihak lain yang berkepentingan baik yang secara langsung ataupun tidak dengan kata lain perlunya sosialisasi baik kepada pelaksana kebijakan, kelompok, sasaran serta masyarakat umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Divisi Informasi dan Integritas Transjakarta yaitu Bapak Fero perihal tentang program jak-lingko dalam hal kerjasama pihak negeri dengan pihak swasta, mengatakan: implementasi program jak-lingko juga tidak luput dari ikut campur proses transmisi melalui sosialisasi. Menurut Fero selaku sebagai kepala divisi informasi dan integritas yang dimana sosialisasi tidak hanya dilakukan pada pelaksana kebijakan saja melainkan sosialisasi kepada masyarakat melalui surat kabar, televisi, sosial media, iklan, dan adanya spanduk pada setiap area – area tertentu. Kedua kejelasan, proses transmisi kebijakan sebaiknya dibarengi dengan kejelasan informasi agar kebijakan yang telah ditransmisikan tersebut dapat diterima dengan jelas sehingga para pelaksana dan sasaran kebijakan dapat mengetahui maksud, tujuan, dan sasaran dari kebijakan tersebut. ketidakjelasan informasi akan menghambat implementasi kebijakan.

Sampai saat ini menurut saya proses penyampaian informasi sudah cukup jelas kepada masyarakat perihal program jak-lingko yang sudah diselenggarakan sebelumnya. Ketiga konsistensi, kekonsistensi sebuah perintah juga diperlukan agar proses implementasi kebijakan menjadi lebih cepat dan efektif sehingga perintah-perintah yang diberikan haruslah konsisten dan jelas. Sumberdaya dalam teori ini George Edwards III mengatakan bahwa sumberdaya berwujud manusia, yakni implementor dan sumberdaya finansial. Komponen dari sumberdaya meliputi jumlah staf, keahlian dari pelaksana, informasi yang relevan, dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber – sumber terkait dalam pelaksanaan program, yang dimana data dapat diharapkan, serta disertai adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fero selaku sebagai Kepala Divisi Informasi dan Integritas berkaitan tentang sumberdaya yang ada didalam program jak-lingko, mengatakan: Jumlah sumberdaya sudah cukup namun untuk pembagian bidang – bidang keahliannya masih kurang dan harus disesuaikan dengan bidangnya masing-masing.

Pemberitahuan kepada masyarakat juga hanya ala kadarnya saja atau bisa dibilang dari pihak satu ke pihak lainnya saja, atau bisa dibilang si dari mulut ke mulut saja. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fero mengenai anggaran dalam program Jak – lingko seperti apa Kalau untuk berapa jumlahnya anggaran yang dibutuhkan kita harus liat data dulu ya mbak, karena kan itu privasi terus kalau untuk alokasi dananya itu seperti apa.. ya yang pasti untuk membiayai kegiatan program jak-lingko, untuk pembiayaan gaji karyawannya, penyediaan fasilitas, dan untuk hal lainnya. Disposisi masalah yang dihadapi program jak-lingko pada disposisi adalah kurangnya berkomitmen dari pelaksana kebijakan serta antar pelaksana kebijakan yang masih menuding satu dinas dengan dinas lainnya. Penanganan seperti haruslah dapat segera diselesaikan melalui beberapa cara yaitu dengan adanya pengangkatan birokrat dengan memberikan intensif bagi pelaksana kebijakan seperti menaikkan gaji atau sebuah reward bagi pegawai-pegawai yang berprestasi. Struktur birokrasi berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fero selaku Kepala Divisi Informasi Integritas Transjakarta serkaitan dengan struktur birokrasi, mengatakan yaa.. pastinya kita sebagai pihak transjakarta akan mematuhi adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kebijakan pengemudi dan pengguna Transportasi Jakarta pada Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengadaan Jasa Layanan Umum Transportasi Jakarta. Kemudian Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 2 ayat 7: Kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang memasuki jalur busway. Sanksi bagi pelanggar adalah ancaman denda maksimum. Satu juta rupiah untuk kendaraan roda empat dan lima ratus ribu untuk kendaraan roda dua. Lalu ada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 78 tahun 2018 tentang Tim Pelaksanaan Program OK Otrip atau Jak-lingko yang disahkan pada tanggal 3 Januari 2018. Peraturan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

SIMPULAN

Segera berpindah ke transportasi yang sudah tersedia. Diperlukannya profesionalitas yang tinggi serta bertanggung jawab dan adanya aturan perencanaan strategis terkait Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan pada program jak-lingko ini, namun sebagai pegawai ataupun staf haruslah lebih mengacu pada kesejahteraan masyarakatnya agar menjadi lebih baik lagi dengan pemanfaatan jasa dan teknologi yang senakin berkembang agar pemerintah mengetahui seberapa banyak kebutuhan yang dibutuhkan pada wilayah Pinang Ranti Jakarta Timur. Jak – Lingko ini bertujuan untuk menjadi induk dari integrasi transportasi publik di Jakarta, memperluas integrasi antar moda transportasi Jakarta, mengurangi adanya penggunaan kendaraan pribadi agar berpindah ke kendaraan umum yang sudah disediakan oleh pihak Transjakarta..

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2011. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Hadi, Sudharto P. 2005. Demensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mangkuprawira, Sjafari. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Jakarta: PT Graha Indonesia
- Nugroho, Panji. 2013. Panduan Membuat Pupuk Kompos Cair. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Rangkuti, Freddy. 2013. Riset Pemasaran. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Salusu, J. 1996. Pengambilan Keputusan Stratejik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Slamet, Juli Soemirat. 2001. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Udaya, Jusuf. 2013. Manajemen Stratejik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wulandari dan Titik, S. 2011. Implementasi Manajemen Kolaboratif Dalam Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Vol 5 No. 1. 32-50. Diakses 16 Maret 2019.